



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2026/Periodik - 2025)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : NURMANSIH
2. Jabatan : PANITERA MUDA PERKARA PERMOHONAN
3. NHK : 620668

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 162.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 162 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA TERNATE , HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 22 m2/25 m2 di KAB / KOTA KOTA TERNATE , HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 22 m2/15 m2 di KAB / KOTA KOTA TERNATE , HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 134.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOBIL, FERENZA LONG Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
3. MOTOR, BENELI MOTOBI EVO 200 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 37.000.000
4. MOTOR, YAMAHA WR 155 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 22.000.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 3.656.317

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 321.656.317



III. HUTANG

Rp. 455.280.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. -133.623.683

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.